



## Daftar Isi

## OPINI WTP DAN UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

**BPK Pantau Kerugian Negara/Daerah &  
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil  
Pemeriksaan**

**Seluruh Kabupaten di Sulbar Raih  
Predikat WTP dari BPK**

**Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD  
Polewali Mandar**

**PEMANTAUAN KERUGIAN DAERAH DAN  
PEMBAHASAN TINDAK LANJUT  
REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK RI  
SEMESTER 1 TAHUN 2022**

**BPK SULBAR PERERAT SINERGITAS  
ANTAR INSTANSI**

**Mamuju (23/05)** - Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat BPK RI **Hery Ridwan** menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD TA 2021 dan LHP Kinerja atas Upaya Pemerintah untuk Menanggulangi Kemiskinan kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat **Sitti Suraidah Suhardi** dan kepada Pj. Gubernur Sulawesi Barat, **Akmal Malik** yang diselenggarakan melalui sidang paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada senin (23/05)

Selain menyerahkan LHP, Hery Ridwan juga menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2021 yang berisi informasi hasil pemeriksaan pada pemerintah provinsi/kabupaten se-Sulawesi Barat untuk memberikan informasi kepada Pj. Gubernur dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten dan tugas pembantuan kabupaten serta kepada Ketua DPRD untuk mengawasi pelaksanaan APBD.

**Lanjut hal 1**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) disimpulkan bahwa, penyusunan LKPD TA 2021 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah sesuai dengan SAP, telah diungkapkan secara memadai, telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, sehingga BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sebagai penekanan pada aspek kinerja tertentu untuk memberikan nilai tambah atas hasil pemeriksaan LKPD, BPK juga menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah untuk Menanggulangi Kemiskinan Tahun Anggaran 2021. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan upaya dalam menanggulangi kemiskinan pada Tahun Anggaran 2021, namun demikian masih terdapat permasalahan yang ditemukan antara lain bantuan yang diberikan untuk penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat belum sepenuhnya memberikan manfaat dan/atau telah dimanfaatkan oleh masyarakat miskin atau penerima manfaat dan upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum memadai dalam memfasilitasi masyarakat miskin untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan ketrampilan serta mendorong pemanfaatan dan pengembangan aset produktif yang berkelanjutan.



Hery Ridwan menyampaikan indikator kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat sebagai bahan evaluasi apakah pengelolaan keuangan daerah ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan menyampaikan bahwa capaian Opini WTP yang telah dipertahankan delapan kali berturut-turut ini dapat diikuti pula dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat.

# SELAMAT !!!



**JUARA 1**



**JUARA 2**



**JUARA 3**

## 1 Tim LKPD Mamuju Tengah

Pemeriksaan Dokumen dalam Penerangan yang terbatas

## 2 Tim LFAR Provinsi

Cek Fisik Tanggul Pemecah Ombah

## 3 Tim LKPD Majene

Cek Fisik Kapal

"Apa yang saya suka tentang fotografi adalah mereka menangkap momen yang hilang selamanya, dan tidak mungkin untuk memproduksinya kembali". – Karl Lagerfeld



## SELURUH KABUPATEN DI SULAWESI BARAT RAIH PREDIKAT WTP DARI BPK

**Gowa(20/5)**–Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat melalui Kepala Perwakilan, **Hery Ridwan** menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD TA 2021 pada Pemerintah Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat masing-masing kepada para Ketua DPRD Kabupaten dan Bupati dan/atau yang mewakili secara fisik terbatas di Kantor Balai Diklat PKN Gowa BPK RI pada Jumat (20/05).



### **Kepala Perwakilan BPK Sulbar, Hery Ridwan**

*"Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkap adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan. Jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berdampak pada adanya potensi dan indikasi kerugian negara, hal tersebut harus diungkap dalam LHP".*

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) masing-masing kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mamuju Tengah. Atas capaian tersebut, BPK RI mengucapkan selamat kepada para Kepala Daerah yang telah berhasil mempertahankan opini WTP dan berharap agar capaian tersebut dapat menjadi momen untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah

Atas pemeriksaan tersebut, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas informasi dan akuntabilitas LKPD antara lain 1) perubahan penjabaran APBD TA 2021 tidak sesuai ketentuan; (2) kesalahan penganggaran; (3) setoran penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah tidak sesuai ketentuan; (4) biaya dan pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan; kelebihan pembayaran atas kurang volume pelaksanaan pekerjaan fisik; (5) denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan fisik belum dikenakan; (6) pengelolaan BMD tidak memadai; dan (7) Pengelolaan PBB-P2 belum memadai

## Tahukah kamu?

**"Manakarra Fair 2022"** menghadirkan berbagai kegiatan seperti event kebudayaan, fesyen, pameran produk UMKM, pertunjukan musik, e-sport, dan Motor Contest. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang masuk dalam 100 besar Kharisma Event Nusantara Kemenparekraf/Baparekraf.





# GALLERY PENYERAHAN LHP/IHPD



Penyerahan IHPD kepada Pemprov Sulbar



Penyerahan LHP kepada Pemkab Mamuju



Penyerahan LHP kepada Pemkab Polewali Mandar



Penyerahan LHP kepada Pemkab Mamasa



Penyerahan LHP kepada Pemkab Majene



Penyerahan LHP kepada Pemkab Pasangkayu



Penyerahan LHP kepada Pemkab Mamuju Tengah



## KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPRD POLEWALI MANDAR KE KANTOR BPK PERWAKILAN SULAWESI BARAT



**Gowa, (20/06)** - Dalam rangka menjaga sinergitas dan menjalin komunikasi dengan stakeholder, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan Komisi IV DPRD Polewali Mandar pada Senin, 20 Juni 2022 bertempat di kantor sementara BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat di Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara Gowa. Kedatangan Anggota Komisi IV DPRD Polewali Mandar yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV, **Rusniadi** bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pengawasan DPRD pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Dalam kegiatan tersebut Ketua beserta anggota Komisi IV disambut oleh Kepala Subauditorat BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, **Nursiska Ria** dan Pejabat Fungsional Pemeriksa, **Riezkie Miyan Ekoputra**. Kepala Subauditorat, Ibu Nursiska Ria menyampaikan peran pengawasan oleh DPRD Kabupaten Polewali Mandar merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan kegiatan BLUD. Diharapkan DPRD dapat bersinergi dengan Dewan Pengawas yang ada pada BLUD, sehingga pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan pada BLUD dapat terwujud.



### TENTANG BLUD

Badan Layanan Umum Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah di Indonesia. BLUD dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas



## PEMANTAUAN KERUGIAN DAERAH DAN PEMBAHASAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER 1 TAHUN 2022



**Gowa (13/06)** – BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan kegiatan Pemantauan Kerugian Negara/Daerah dan Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2022 dengan seluruh Inspektorat se-Sulawesi barat secara daring dan tatap muka di Kantor Sementara BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan yang dilaksanakan sejak 13 Juni s/d 22 Juni 2022 tersebut dibuka secara resmi oleh Plh. Kepala Sub Auditorat BPK Sulbar **Riezkie Miyan Ekoputra**.

Kegiatan Pemantauan Kerugian Negara/Daerah bertujuan untuk memverifikasi dan menguji jumlah kerugian daerah dan menilai kelancaran proses penyelesaian dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui posisi dan jumlah tuntutan per-bendaharaan (TP), tuntutan ganti rugi (TGR) dan pihak ketiga pada pemerintah daerah. Selain itu kegiatan ini juga untuk memutakhirkan status kerugian daerah berupa status penetapan, proses penetapan maupun informasi serta kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian kerugian daerah. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK. Dari tujuh entitas pemeriksaan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, masih terdapat dua entitas yang penyelesaian tindak lanjut masih dibawah 75% yaitu Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali Mandar. Untuk itu dalam kegiatan ini diharapkan pemerintah daerah dapat menyampaikan dokumen pendukung tindak lanjut sehingga terdapat peningkatan yang signifikan dalam penyelesaian tindak lanjut

## " BPK SULBAR PERERAT SINERGITAS ANTAR INSTANSI "

## BPK SULBAR TERIMA AUDIENSI KOMISI INFORMASI SULBAR



Mamuju (22/03) –Dalam rangka mempererat sinergitas BPK dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini TNI dan Polri dalam lingkup pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat bersama Komando Resor Militer 142 Taroadat Tarogau (Korem 142/Tatag) melakukan Audiensi ke Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Kepala Perwakilan Hery Ridwan didampingi Kepala Sekretariat Perwakilan Aminullah dan Kepala Subauditorat Nursiska Ria diterima langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Barat Irjen. Pol. Eko Budi Sampurno beserta jajarannya.

Dalam kunjungannya Hery Ridwan menyampaikan terima kasih atas sinergitas yang telah terjalin antara BPK Provinsi Sulawesi Barat dengan Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan berharap BPK Sulbar bersama dengan Polda Sulbar bisa terus menjalin silaturahmi dan sinergitas yang lebih baik. Pada kesempatan tersebut kepala perwakilan beserta rombongan diajak meninjau masjid yang ada di Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, dimana masjid tersebut memiliki keunikan tersendiri yakni terdapat kolam ikan yang berada tepat ditempat sholat imam.

*Suasana Diskusi  
BPK Sulbar dengan  
Komisi Informasi  
Sulbar*



**Kepala Perwakilan BPK Sulbar,  
Hery Ridwan**

*"Saat ini kami memiliki media pelayanan informasi yang dapat diakses langsung oleh masyarakat atau badan publik yang membutuhkan informasi mengenai BPK Sulbar seperti website, twitter, dan e-mail hal tersebut untuk lebih memudahkan".*

Rombongan KI Sulbar yang dipimpin oleh komisioner KI Bidang Kelembagaan dan Hubungan Antar Lembaga Andi Fachriady kusno beserta jajarannya disambut oleh Kepala Perwakilan menyatakan maksud kedatangannya adalah untuk melakukan silaturahmi bersama dengan jajaran BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat serta mensosialisasikan keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik khususnya bagi pelayanan informasi melalui peran serta Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) dimana keterbukaan informasi tersebut dapat diterapkan melalui Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID), yang ditugaskan untuk mengelola informasi di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dalam mendukung keberadaan tugas dan fungsi BPK Provinsi Sulawesi Barat.



## PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN LKPD 2021

Dalam pelaksanaannya, para peserta Diklat memperoleh materi terkait kebijakan dan harapan pemeriksaan LKPD, FAQ Pemeriksaan LKPD, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), pemanfaatan Portal e-Audit dan Big Data Analytics dalam pelaksanaan pemeriksaan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi peserta sehingga tercipta satu pemahaman/persepsi yang sama terkait suatu permasalahan dalam pemeriksaan LKPD, dan untuk meningkatkan serta menjaga kualitas hasil pemeriksaan LKPD.

Gowa, (17/01) – Dalam rangka persiapan kegiatan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2021 di lingkungan pemerintah Provinsi dan Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat yang akan dilaksanakan pada Triwulan I 2022, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama dengan Balai Diklat PKN Gowa BPK RI menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pemeriksaan LKPD TA 2021 bagi Pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.

Kegiatan tersebut berlangsung selama lima hari yaitu sejak tanggal 17 s.d. 21 Januari 2022 dan berlangsung secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku umum guna mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Pandemi COVID-19. Sebagai pengajar/fasilitator pada Diklat Pemeriksaan LKPD TA.2021 yakni Wicaksono Agung Prabowo, David Patasaung, dan Asdar.





**Pelepasan Mahasiswa PKL**  
Maret 2022



**Sillaturrahmi BPK Sulbar dengan BPKP**  
Mei 2022



**DWP Berbagi Takjil**  
April 2022



**Sillaturrahmi BPK Sulbar dengan Polda Sulbar**  
Mei 2022



**Koordinasi Bawaslu Majene**  
Februari 2022



**Family Gathering**  
Januari 2022



**Pelepasan Mahasiswa PKL**  
Maret 2022



**Kunjungan PUPR meninjau Pembangunan Kantor BPK Sulbar di Mamuju**  
Maret 2022



**DWP Berbagi ke Panti Asuhan**  
April 2022



**Pengarahan Kepala Perwakilan bagi CPNS Formasi 2021**  
Juni 2022



**Rapat Pemeriksa BPK Sulbar dengan KAP**  
April 2022



**Penutupan Diklat Pemeriksa**  
Januari 2022

## PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN TA 2021 SELURUH PEMERINTAH DAERAH SE-PROVINSI SULAWESI BARAT

Mamuju, (24/03) - Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat (BPK Sulbar) menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran (TA) 2021 dari Pemerintah se-Provinsi Sulawesi Barat yang diserahkan langsung oleh masing-masing kepala daerah atau yang mewakili kepada Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat BPK RI, Hery Ridwan di Ruang serba guna Lt. 2 Gedung BPK Sulbar, Mamuju.



Dalam penyampaiannya, Gubernur Sulawesi Barat Ali Ba'al Masdar berharap dapat mempertahankan capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Sulbar atas Pemeriksaan LKPD TA 2021 dengan kualitas laporan yang lebih baik seperti berkurangnya jumlah rekomendasi maupun jumlah temuan BPK Sulbar dari tahun sebelumnya serta menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendukung kelancaran proses pemeriksaan yang akan dilakukan BPK dengan memerintahkan Sekretaris Daerah, para Kepala OPD, serta Pejabat Pengelola Keuangan OPD agar selalu kooperatif dengan memberi data dan informasi yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan.

Terkait hal tersebut, Hery Ridwan mengapresiasi Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Barat yang telah menyelesaikan dan menyampaikan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk laporan keuangan TA 2021 sebelum tanggal 31 Maret 2022. Selanjutnya BPK Sulbar akan segera melakukan pemeriksaan dengan memerhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Lebih lanjut, Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat berharap kepada Para Kepala Daerah beserta jajarannya turut mendukung, berkomitmen dan bekerjasama dalam rangka pemenuhan data/dokumen/informasi/keterangan yang dibutuhkan tim selama proses pemeriksaan, serta mengajak untuk bersama-sama menjaga Nilai-Nilai Dasar BPK yaitu Independensi, Integritas dan Profesionalisme sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Kegiatan penyerahan LKPD Unaudited TA 2021 dilaksanakan pada 21 dan 24 Maret 2022, dimana pada Senin, 21 Maret 2022 BPK Sulbar telah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Pasangkayu sedangkan LKPD Unaudited TA 2021 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamasa masing-masing diterima pada Kamis, 24 Maret 2022



# TOURIST ATTRACTION

MAKASSAR - SULAWESI SELATAN



## FORT ROTTERDAM

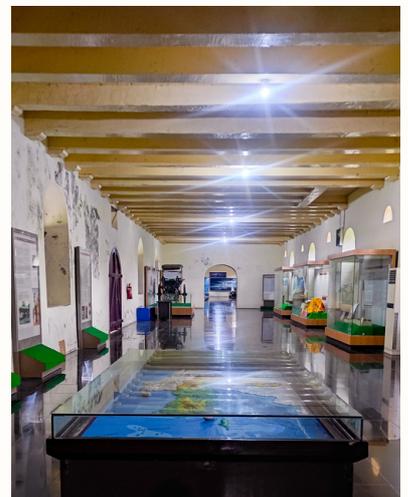
Oleh Olenka TS / Editor: Arya C

Fort Rotterdam atau Benteng Rotterdam yang berlokasi di sebelah barat Kota Makassar ini merupakan peninggalan sejarah dari masa kerajaan Gowa-Tallo. Dibangun tahun 1545 oleh Raja Gowa ke-10, **Manrigau Daeng Bonto Karaeng Lakiung**, awalnya berbentuk segi empat mengikuti gaya Portugis.

Namun setelah penandatanganan Perjanjian Bongaya, VOC membangunnya kembali dan arsitekturnya masih bertahan hingga sekarang.

Fort Rotterdam awalnya berfungsi sebagai markas komando pertahanan, kemudian kantor perdagangan, kediaman pejabat tinggi, dan pusat pemerintahan di wilayah timur Nusantara. Namun saat ini Fort Rotterdam merupakan properti milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 1970.

Di dalam kompleks Fort Rotterdam terdapat juga Museum La Galigo. Di sini pengunjung bisa mempelajari sejarah dan budaya Sulawesi Selatan mulai dari masa prasejarah hingga modern



# KULINER MAKASSAR

## PALLUBASA

Merupakan makanan tradisional Makassar, Sulsel. Pallubasa sendiri diambil dari bahasa Makassar. Pallu artinya makanan dan basa artinya basah. Jadi bisa dikata Pallubasa adalah makanan berkuah. Makanan ini berbahan daging/jeroan sapi dengan kuah kelapa parut yang disangrai atau digoreng sehingga kuahnya kental. Dan bisa ditambahkan kuning telur mentah.



**Jl. Serigala XIV, Mamajang  
Dalam Kota Makassar**  
Buka 09.00 - 23.00

## COTO MAKASSAR

Siapa tidak kenal coto makassar ? Makanan khas ini dulunya merupakan hidangan khusus bagi kalangan istana Kerajaan Gowa. Kini hidangan sup daging dengan berbahan kaya rempah dan sambal tauco ini digemari seluruh penikmat kuliner. Salah satu restoran dimana kita bisa menikmati hidangan ini adalah restoran Coto Nusantara



## KONRO

Makanan khas yang diolah dari iga sapi ini kerap menjadi incaran para wisatawan yang berkunjung ke makassar. Salah satu restoran di makassar yang dapat kita kunjungi untuk dapat menikmati menu khas iga sapi ini adalah Konro Karebosi yang terletak di pusat Kota Makassar. Restoran ini sudah berdiri sejak tahun 1968. Menu andalan restoran ini adalah Sop Konro Bakar. Olahan iga ini dimasak empuk serta dibakar dengan sempurna dibumbui dengan saus kacang yang nikmat.



**Jl. Gn. Lompobattang N0.41-43  
Pisang Utara, Kota Makassar**  
0851-0235-4000  
Buka 10.30 - 22.30